

PERGESERAN PERILAKU POLITIK ISLAM TRADISIONAL PASCA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI KOTA TASIKMALAYA

Akhmad Satori dan Moh. Ali Andrias

Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jl. Siliwangi No.24 Tasikmalaya 46115
sattori81@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana pergeseran perilaku pemilih warga Nahdhiyin tahun 2009 di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penggunaan metode ini akan memperoleh data berupa deskripsi ucapan, tulisan, serta penekanan pada aspek subjektif yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat pergeseran perilaku politik di kalangan warga Nahdhiyin, hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor, *pertama*, masyarakat semakin rasional dalam menentukan sikap politik nasional maupun lokal, *kedua*, pengaruh informasi dan budaya politik cukup berpengaruh pada sebagian besar warga Nahdhiyin, kemudian tidak menafikan bahwa pecahnya kongsi antara Gus Dur dan Muhaimin berdampak signifikan terhadap arah politik warga Nahdhiyin, terjadi kebingungan politik yang mengakibatkan warga NU bebas memilih yang penting memberikansuara kepada elit politik yang terbaik.

Kata Kunci : Pergeseran Politik, Perilaku Pemilih, Islam Tradisional

Abstract

This study examines how the political behavior of voters Nahdhiyin (traditional Islam) after the election of 2009 in the city of Tasikmalaya. This study used qualitative research methods, the use of this method will get the data in the form of descriptions of speech, writing, as well as the emphasis on subjective aspects that can be observed from the people (subjects) itself. From the research that has been done that there is a shift in political behavior among residents Nahdhiyin, it is not independent of several factors: first, the public is increasingly rational in determining the attitude of national and local politics, secondly, the influence of information and considerable influence on the political culture of most citizens Nahdhiyin, then do not deny that the outbreak of the partnership between Gus Dur and Muhaimin significant impact on the political direction Nahdhiyin citizens, political confusion resulting NU choose is important to vote for the best political elite.

Keywords: *Shifting Politics, Voter Behavior, Traditional Islam*

Konstelasi politik Indonesia era reformasi ini secara tidak langsung telah merubah pandangan masyarakat terhadap politik lebih terbuka dan transparan. Masyarakat memperoleh kebebasan dan hak politiknya, untuk menentukan pemimpin dan partai politik (parpol) sesuai dengan keinginannya. Proses transisi demokrasi yang diamanatkan melalui pemilu langsung, merupakan

preferensi yang membebaskan masyarakat lebih rasional, cerdas, dan transparan memilih pandangan politik yang sesuai dengan hati nurani rakyat, terutama *platform* dan program politik yang jelas demi kemaslahatan bersama. Meskipun realitasnya pandangan politik rasional masyarakat Indonesia saat ini, tidak bisa dilepaskan oleh pemikiran politik dan

budaya politik yang mempengaruhinya.

Mengacu penelitian Indonesianis Herbeth Feith dan Lance Castle (1988) pada tahun 1945-1965, bahwa ada lima aliran pemikiran politik yakni Nasionalisme Radikal, Islam, Tradisional Jawa, Sosialisme, dan Komunis. Kelima aliran pemikiran politik ini sedikit banyak telah mempengaruhi dinamika dan sistem politik di Indonesia hingga beberapa dekade terakhir. Meskipun pemikiran politik kita mengacu konsep dan ideologi Pancasila dan demokrasi, namun pada era reformasi ini beberapa pemikiran yang sudah diungkapkan Feith dan Castle masih dianggap relevan mempengaruhi politik masyarakat Indonesia.

Salah satu arus pemikiran yang terus mengisi dinamika politik di Indonesia adalah pemikiran politik Islam (tradisional maupun modernis), yang secara langsung berpengaruh pada pola kehidupan yang lebih luas ke dalam struktur masyarakat, yang kemudian dipahami dan diinternalisasikan ke dalam sebuah konsep dan sistem politik Indonesia. Dasar-dasar dan nilai-nilai Islam terus berkembang membentuk karakter politik masyarakat hingga beberapa dekade terakhir.

Kajian ini menjadi lebih menarik ketika pemikiran politik Islam yang sudah sejak lama mewarnai perpolitikan di Indonesia, bahkan sebelum bangsa Indonesia membentuk pemerintahan (negara). Namun realitasnya politik Islam terutama partai politik (parpol) yang menganut azas Islam tidak sepenuhnya berkuasa atau mendominasi dalam pemerintahan, bahkan bisa dikatakan mengalami pasang surut sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga reformasi ini.

Memahami Pendekatan dalam Perilaku Memilih

Ada banyak perspektif dalam memahami perilaku politik di dunia misalnya Dieter Roth (2003) mengungkapkan model-model penjelasan teoretis mengenai perilaku Pemilu. Menurutnya terdapat tiga macam pendekatan yang dapat menerangkan perilaku Pemilu. Ketiganya tidak sepenuhnya berbeda, bahkan dalam banyak hal memiliki kesamaan dalam hal kronologis dasar pemikirannya¹:

Pertama, Pendekatan sosiologis, terbagi atas model penjelasan mikrososiologis yang diilhami dari sosiolog Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson dan Hazel Gaudet. Sedangkan Makrososiologis dari Seymour Martin Lipset dan Rokkan. Menurut Mikrososiologis, setiap manusia terikat alam lingkaran sosialnya, semisal keluarga, rekan-rekan, tempat kerja dan lain sebagainya. Model ini kemudian diterapkan dalam memahami perilaku memilih. Makrososiologis mengacu pada konflik-konflik mendasar yang biasa muncul di masyarakat yang kesetimbangannya perlu dipertahankan dalam sebuah demokrasi. Kajian ini mereka lihat dari studi empiris di Jerman.

Kedua, Pendekatan sosial psikologis, menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan Pemilu jangka pendek atau keputusan yang diambil dalam waktu singkat, yang

¹ Roth Dieter, *Studi Pemilu Empiris : Sumber, Teori-teori, dan Metode*, (terj.), Friedrich Naumann-Stiftung-Fur die Freiheit, Jakarta. Hal.23-53. dalam Resume yang dilakukan Subhan Agung dalam Mesin parpol dan Perilaku Pemilih, <http://mega.subhanagung.net/mesin-parpol-dan-perilaku-pemilih/>. Juga dalam Kuskridho Ambardi dan Tri Ratnawati, *Bahan Bacaan Mata Kuliah Perilaku Politik*, Pascasarjana Politik UGM, 2010.

dijelaskan lewat *trias determinan*, yakni identifikasi partai, orientasi kandidat dan orientasi isu politik.

Ketiga, Pendekatan *rasional-choice*, menurut model ini yang menentukan dalam sebuah Pemilu bukanlah adanya ketergantungan dalam ikatan sosial tertentu, melainkan hasil penilaian dari warga yang cakap. Pusat perhatiannya terletak pada perhitungan biaya dan manfaat (*cost and benefit*). Penganut model ini salah satunya adalah VO. Key yang melakukan penelitian di tahun 60-an dan menghasilkan karya *The Responsible Electorate*.

Kemudian Robi Muhamad, dalam *Swing Voters dan Jejaring Sosial*², mengungkapkan dua pendekatan utama dalam perilaku politik (*voter behavior*), yakni : *pertama*, teori pemilih rasional, di mana pemilih diasumsikan memiliki preferensi politik yang tidak berubah berdasarkan pertimbangan keuntungan tertentu yang biasanya lebih bersifat ekonomis. Maka tidak tepat menggunakan teori pemilih rasional untuk menjelaskan perilaku pemilih yang preferensi politiknya justru berubah-ubah seperti *swing voters*. Ini bukan berarti *swing voters* tidak memilih dengan rasional, tetapi bagi *swing voters*, preferensi yang menjadi dasar pilihan rasional itu sendiri berubah dan perubahan preferensi ini tidak bisa dijelaskan oleh teori pemilih rasional. *Kedua*, teori pemilih psikologis. Menurut teori pemilih psikologis, pemilih terikat kepada partai atau kandidat presiden karena ikatan partisan atau simbolik. Ikatan partisan dan simbolik ini biasanya mengakar dalam, sehingga membuat preferensi politik

menjadi stabil. Karenanya teori ini juga tidak tepat dipakai untuk menjelaskan ketidakstabilan preferensi politik pemilih.

Dari pendekatan-pendekatan di atas, masih ada yang belum *tercover*, misalnya pengaruh media dalam mempengaruhi perilaku memilih seseorang. Media dalam konteks mempengaruhi perilaku memilih meliputi dua hal yakni *converting* (mengubah pandangan awal pemilih menjadi pilihan lain), atau *reinforcing* (memperkuat pilihan awal yang sudah diyakini sebelumnya).

Interaksi Masyarakat Tasikmalaya, Kyai dan Pesantren

Eksistensi pesantren bagi masyarakat Tasikmalaya, seperti darah dan nadinya tubuh manusia. Tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan satu sama lainnya. Oleh karena itu Tasikmalaya dikenal sebagai sebagai kota santri dan wilayah memiliki pesantren terbesar di dunia. Hal ini dilihat dari banyaknya pesantren sekitar 700 pesantren, dengan kehidupan masyarakatnya yang agamis dan religius³.

Pesantren dan kyainya bagi masyarakat Tasikmalaya adalah panutan yang memiliki hubungan akidah atau keyakinan agama yang kuat. Karenanya, pesantren dapat pula dipandang sebagai pusat perubahan. Pesantren adalah bagian dari sistem kehidupan, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1) eksistensi pesantren sebagai lembaga kehidupan yang berlainan dengan pola kehidupan umum, 2) terdapatnya sejumlah penunjang yang menjadi tulang punggung pesantren, 3) berlangsungnya proses pembentukan

² Muhamad, Robi, *Swing Voters dan Jejaring Sosial*, di <http://www.politikana.com>.

³ Tatang Farhanul Hakim, *Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat*, (CV. Gajah Poeloeng: Tasikmalaya, 2004), hlm.91

tata nilai yang tersendiri lengkap dengan simbol-simbolnya, 4) adanya daya tarik ke luar sehingga memungkinkan masyarakat sekitar menanggapi pesantren sebagai alternatif ideal bagi sikap hidup yang ada di masyarakat itu sendiri, dan 5) berlangsungnya suatu proses pengaruh mempengaruhi dengan masyarakat di luarnya yang akan berakumulasi pada pembentukan nilai-nilai baru, yang secara universal diterima oleh kedua belah pihak.⁴

Kecenderungan ke arah kehidupan akhirat (*ukhrawi*) ini merupakan pokok dasar kehidupan pesantren, yang ditandai dengan pengerjaan perintah-perintah agama seteliti dan selengkap mungkin. Terutama bila dipandang dari sudut materi, asalkan pandangan *ukhrawi* itu sejauh mungkin dapat dipuaskan. Kedengarannya memang aneh, dan penuh gema sikap hidup fatalistis (menerima apa adanya), akan tetapi hal ini mempunyai nilai positif, yakni 1) adanya kemampuan menciptakan penerimaan perubahan-perubahan status dalam kehidupan dengan mudah, dan 2) fleksibilitas para santri untuk menempuh kehidupannya kelak. Hambatan-hambatan kejiwaan yang sering berupa presentasi-presentasi etis yang kaku di kalangan mereka yang hidup di luar jangkauan kehidupan pesantren, hanya dijumpai dalam kadar minim belaka di lingkungan pesantren. Dengan demikian dalam pesantren sebenarnya telah secara laten terdapat dinamisme yang bersifat adaptif terhadap kemajuan di luarnya.

Seorang kyai dengan para asistennya merupakan pemegang kekuasaan satu-satunya yang secara eksplisit diakui dalam

lingkungan pesantren. Di atas kewibawaan moral sang kyai sebagai penyelamat para santri dari kemungkinan melangkah ke arah kesesatan, kekuasaan ini memiliki perwatakan absolut. Struktur kekuasaan interen ini, yang sama sekali tidak mau berbagi tempat dengan kekuasaan dari luar dalam aspek-aspek yang paling sederhana pun, juga membedakan kehidupan pesantren dari kehidupan umum di sekitarnya. Demikian besarnya kekuasaan seorang kyai atas diri santrinya, sehingga santri untuk seumur hidupnya akan senantiasa merasa terikat dengan kyainya. Minimal sebagai sumber inspirasi dan sebagai penunjang moral dalam kehidupan pribadinya. (Tatang, 2004:98). Banyaknya pesantren yang berafiliasi dengan NU, sejak lama disebabkan asal sosial NU. Memang berada di pedesaan di mana pesantren-pesantren itu berada. Dukungan pesantren yang begitu besar dan perkembangan politik di Indonesia pada tahun 1950-an memungkinkan NU muncul sebagai parpol. NU keluar dari Masyumi tahun 1952, dan menjadi salah satu empat besar dalam pemilu 1955.

Pondok pesantren adalah produk akulturasi masyarakat Indonesia terhadap kebudayaan Hindu dan Budha, dua kebudayaan Islam yang menghasilkan lembaga baru yang berbeda dengan apa dijumpai di India atau Arab. Pesantren mempunyai ciri-ciri khusus dan semacam kepribadian yang diwarnai oleh karakteristik pribadi sang kyai, unsur kepemimpinan pesantren, bahkan juga aliran keagamaan tertentu yang dianut.

Lahirnya pondok pesantren berawal dari sistem *zawiyyah* kaum sufi yang dikembangkan, tetapi kenyataan sekarang tidaklah berarti setiap pesantren merupakan

⁴ Abdurrahman Wahid dalam Tatang, *ibid.*, hlm. 92-93

pusat gerakan tasawuf. Pada saat ini pesantren lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan. Yang melakukan peranan sebagai pusat gerakan *tarikah* hanya sedikit sekali saja. Sementara ahli berpendapat bahwa pondok pesantren sebenarnya adalah khas Jawa, sedangkan lembaga pendidikan Islam di luar Jawa umumnya telah memakai sistem madrasah, seperti Perguruan Thawalib dan Diniyah School di Minangkabau, Madrasah Darud Da'wah wal Irsyad di Soppeng, Sulawesi Selatan hingga Irian Jaya. Pesantren merupakan lembaga pendidikan asli Indonesia, terdapat dan tumbuh di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai variasi⁵.

Refleksi Perkembangan Islam dan NU di Tasikmalaya

Kilas Sejarah Islamisasi di Tanah Sunda

Membahas sejarah panjang Islamisasi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat (Jabar) tidak cukup dijelaskan dalam beberapa paragraf. Akan tetapi sangat penting untuk merefleksikan perkembangan Islam Jabar, khususnya di Tasikmalaya agar penelitian ini bisa terkesan utuh. Mencermati Islamisasi di tanah Sunda ini memang tidak terlepas dari perjuangan dakwah oleh seorang wali, yakni Sunan Gunung Jati. Islamisasi di Jabar dilakukan dari dua arah di barat lewat Banten serta di timur dipusatkan di Cirebon, sehingga proses sosialisasi dan internalisasi keislaman di tatar Sunda ini tampak lebih kokoh dibanding di tanah Jawa. Meskipun bagi sebagian yang belum atau tidak menerima Islam melakukan “perlawanan” secara tertutup seperti yang dilakukan

suku Baduy atau oleh sebagian elite dan masyarakat yang tetap menjalankan dan melestarikan ajaran *tatali karuhun* yang banyak dipengaruhi ajaran Hindu.

Namun ajaran Islam tidak hanya dilakukan seorang wali saja, beberapa abad lalu pada saat Kerajaan Mataram tampil sebagai pusat kekuasaan di Jawa, Sutawijaya (Sultan Agung) terlebih dahulu melakukan pendudukan atas wilayah Priangan. Pemimpin yang pro dengan Kerajaan Mataram adalah Wirawangsa dan mendapat kekuasaan untuk perluasan wilayah di tanah priangan dari Sukakarta menjadi Sukapura. Wilayah Sukapura semakin berkembang sebagai daerah kekuasaan Mataram, pada saat bersamaan para pendakwah Islam berdatangan ke wilayah Sukapura, antara lain Syaikh Abdul Muhyi adalah ulama *masagi* atau paripurna. Ada beberapa hal yang membuatnya berhasil menyebarkan dakwah di wilayah priangan. **Pertama**, ia memiliki jaringan luas meliputi Cirebon-Aceh-Makassar-Solo-Gresik-Trengganu yang membuat namanya menjadi harum dan *legitimate*. **Kedua**, Syaikh Abdul Muhyi adalah ulama moderat yang independen terhadap kekuasaan. **Ketiga**, beliau adalah ulama yang akomodatif dengan budaya lokal. Sejauh ini tidak ada perlawanan dari masyarakat tentang dakwahnya. Hal itu menunjukkan pemahaman mendalam Syaikh Abdul Muhyi terhadap kebudayaan, sehingga orang Sunda di wilayah Priangan Timur secara tulus mengakui bahwa dialah tokoh yang mengislamkan *karuhun* (nenek moyang). **Keempat**, beliau adalah ulama yang patriotik yang anti penjajahan Belanda. Tempat mereka mengikat komitmen adalah Pamijahan, lokasi makam Syaikh Abdul Muhyi yang sangat dihormati oleh warga

⁵ *Ibid.*, hlm. 9-11

Tasikmalaya dan di luar Tasikmalaya. Dari Batari Hyang di Galunggung, sumber sprilitualitas warga Tasikmalaya dan Priangan Timur beralih ke Abdul Muhyi di Pamijahan. Kini, warga Tasikmalaya yang mayoritas muslim akan mengatakan bahwa leluhur mereka diislamkan oleh Syeikh Abdul Muhyi. Demikian pula keluarga pesantren Cipasung menjelaskan hal yang sama, bahwa sumber spiritual mereka adalah Pamijahan⁶.

Dalam perkembangan selanjutnya, mendalamnya proses internalisasi keislaman ke dalam karakter kehidupan *urang* Sunda telah menjadikan Islam sebagai bagian identitas warga Sunda sendiri, sehingga *urang* Sunda kemudian diidentifikasi dengan Islam atau kalau meminjam istilah Azyumardi Azra, Islam bagi *urang* Sunda sudah menjadi *supra identity*. Bahkan ada suatu asumsi yang ingin dibangun bahwa Islam bisa berkembang dengan melalui budaya Sunda dan sebaliknya budaya Sunda bisa “mekar” dengan semangat keislaman.

Meskipun memang di beberapa daerah ada *urang* Sunda yang tidak beragama Islam seperti bekas pengikut Madrais di Kuningan atau penganut agama Sunda Wiwitan di Badui itu merupakan suatu kekecualian kalau bukan keanehan. Tapi secara keseluruhan identitas kesundaan hampir identik dengan keislaman sebagaimana juga kaum Melayu di Malaysia. Kenyataan ini secara kultural dapat diuji dengan membuktikan bagaimana upacara-upacara adat Sunda seperti perkawinan, khitanan, kematian, kelahiran bayi sampai syukuran bertaburan simbol-simbol dan syariat keislaman meskipun

dalam waktu yang sama sering juga ada sinkretisme dengan sisa peninggalan Hinduisme atau animisme Sunda lama. Jika dalam kehidupan budaya, keislaman dengan kesundaan demikian lekat bagaimana halnya dengan kehidupan politik praktis di tatar Sunda ini.

Sejarah mencatat bahwa peristiwa penting sejak era kolonialisme hampir selalu berkaitan dengan peran penting Islam, yang diperankan oleh para ulama dalam memberikan perlawanan terhadap kaum penjajah. Sebagaimana ditunjukkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, Kiai Tapa, Ki Bagus Rangin di Majalengka. Kehadiran Sunan Gunung Djati mengubah struktur politik di Jabar, kekuasaan Pakuan Padjajaran mendapat saingan yang berakhir dengan kematiannya. Bagaimana peristiwa pemberontakan petani Banten di tahun 1888 merupakan peristiwa sangat penting yang kemudian banyak mengubah kebijakan Belanda di tanah jajahan, di mana motor gerakan pemberontakan ini terutama dilakukan oleh para ulama.

Masa kemerdekaan terlihat bagaimana kemudian para ulama dan tokoh Islam misalnya, melakukan mobilisasi laskar-laskar jihad dan pasukan *fisabilillah* yang merasa kecewa atas perjanjian Renville yang menjadikan Jabar sebagai wilayah kekuasaan Belanda, kecuali Banten sehingga harus mengungsi ke Yogyakarta. Laskar-laskar ini yang kemudian memproklamasikan DI/TII yang dipimpin S.M. Kartosuwiryo di Garut yang kemudian ditumpas pemerintah Soekarno. Pada masa pendudukan Jepang ada pula perlawanan yang dilakukan oleh K.H. Zaenal Mustofa di Sukamanah, Tasikmalaya. Dengan demikian terlihat bahwa semangat keislaman ini

⁶ (Yahya, 2006 : 11-13)

pun memberikan kontribusi sangat besar terhadap perlawanan pada penjajah dan upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI.

Peta politik di Jabar maupun nasional semakin jelas terlihat dengan penyelenggaraan pemilu pertama tahun 1955, di mana bahwa partai Islam Masyumi memperoleh suara terbesar yaitu 26,5%, disusul PNI 22,1%, PKI 10,9% serta PSII dan Perti 5,7% atau secara keseluruhan (partai-partai Islam memperoleh 41,9%). Dengan demikian, terlihat bahwa meskipun penduduk Jawa Barat lebih 90% beragama Islam tapi secara politik Islam tidak cukup dominan. Meskipun demikian antara kekuatan Islam dan non-Islam relatif cukup berimbang.

Hal yang lebih ironis justru terlihat pada pemilu pasca reformasi tahun 1999, partai-partai Islam kalah telak oleh PDIP yang sejak semula dicap sebagai partai sekuler. Bahkan jika seluruh partai-partai Islam digabung pun tetap belum mampu menyaingi suara PDIP sebesar 32,6%, disusul Golkar 23,6%, PPP 15,2%, PAN 7,2% dan PKB 7,05%. Fakta lebih ironis terlihat dalam pemilu 2004, kecuali PKS, semua partai Islam mengalami penurunan signifikan, bahkan dalam pemilu presiden paket yang menjadi simbol representasi Islam dan Sunda yaitu Hamzah Haz dan Agum Gumelar, kalah dengan amat tragis bahkan di basisnya sendiri di tanah Sunda.

Menanggapi kenyataan itu tidak aneh kalau K.H. Miftah Faridl sempat mengatakan, hal itu merupakan bukti bahwa dakwah kita selama ini telah gagal. Di mana Islam hanya diidentikkan dengan urusan ibadah dan individual saja sedangkan dalam urusan mu'amalah atau siasah (politik)

Islam terabaikan. Itu berarti suatu kemenangan bagi kaum modernis yang terus mengembuskan dan hanya menjadikan Islam sebagai landasan etik dan moral saja. Memang banyak faktor yang dapat dirujuk yang menjadi sumber kekalahan partai-partai Islam sendiri.

Apa pun alasannya bahwa secara keseluruhan jika dibuat grafik maka peran keislaman dalam politik sejak masa kolonial sampai sekarang di Jabar terlihat bahwa peran Islam semakin merosot tajam. Para ulama yang sejak dulu menjadi motor penggerak dalam dinamika politik lokal Sunda kini sudah terpinggirkan dalam percaturan politik formal bahkan sejak Orba citranya sebagian terpuruk karena sering para ulama ini hanya menjadi "corong", juru doa dan alat legitimasi rezim Orba, sehingga tidak aneh jika waktu itu MUI sering diplesetkan menjadi "Majelis Istana Indonesia". Lebih dari itu tokoh-tokoh Sunda yang "*Nanjeur*" di tingkat nasional pun lebih dikenal sebagai "nasionalis"-nya dibandingkan "Islamis"-nya. Barangkali tidak berlebihan jika keislaman di kalangan Sunda pun lebih dominan abangannya ketimbang santrinya seperti istilah Geertz atau Islam sinkretiknya ketimbang Islam ortodoksnya dalam istilah Karl D. Jackson.

Potret buram politik Islam ini sebagian masih terselematkan karena di luar jalur formal kekuatan politik Islam masih diperlihatkan oleh aksi-aksi sporadis aktivis masa Islam dari kalangan pemuda dan mahasiswa seperti HMI, KAMMI, GPI, PII dan front atau laskar-laskar keislaman lainnya yang masih menjadi kekuatan moral terhadap berbagai efek penyimpangan kebijakan negara dan pelaksanaan pemerintahan.

Dengan demikian jika secara kultural keislaman merupakan bagian paling inharen dari unsur Kesundaan, meskipun hal ini pun sekarang mulai juga digerogeti oleh invasi yang masif budaya sekularisme dan hedonisme, maka secara politik antara kesundaan dan keislaman masih jauh panggang dari api sehingga masih merupakan proses panjang untuk menyatukannya dan menjadikannya sebagai satu kesatuan persenyawaan yang tidak terpisahkan. Meskipun demikian sangat terasa bahwa Islam tetap merupakan faktor utama yang mengintegrasikan subetnis Priangan, Cirebon dan Banten. Sehingga meskipun Banten secara administratif dan politik pemerintahan telah berdiri sendiri tetapi secara historis, kultur dan agama orang Banten tidak ingin lepas *duduluran* dengan *urang* Sunda lainnya.

Sejarah NU Tasikmalaya

Sejarah Nahdatul Ulama di Kota Tasikmalaya tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan berdirinya kota Tasikmalaya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya tahun 2001 silam. Hanya saja yang pasti, NU Tasikmalaya lahir dan berkembang jauh sebelum kota Tasikmalaya ini berdiri.

Adalah sulit untuk dapat mengungkap secara pasti bagaimana perintisan dan kapan persisnya NU di Tasikmalaya itu secara organisatoris berdiri. Sebab, tidak ditemukan catatan tertulis otentik yang merekam hal tersebut secara sistemik. Para ulama yang menjadi pelaku sejarah (*founding fathers*) dalam perintisan NU Tasikmalaya pun sudah tidak bisa diketemukan lagi. Para Kiyai sepuh

yang merupakan generasi pertama NU Tasikmalaya sudah tidak ada lagi, bahkan generasi kedua (*tabi'in*) sudah hampir sulit untuk ditemukan.

Menurut Ust. Kakan Rustandi salah seorang pengurus NU kota Tasikmalaya, cikal bakal NU di Tasikmalaya lahir dari komunitas yang memegang tradisi pesantren dan secara faham menganut *ahl sunnah wal jamaah*. KH. Ruhiyat pendiri Ponpes Cipasung kemudian KH. Zaenal Musthapa dari Pesantren Sukahideung Singaparna adalah dua diantara beberapa tokoh kiyai generasi pertama yang menanamkan embrio kelahiran NU Tasikmalaya.

Berkembang pesatnya pesantren di Tasikmalaya, memberikan andil yang cukup besar terhadap berkembangnya pula NU di Tasikmalaya, demikian juga jam'iyah nahdiyiyin sebutan bagi masyarakat NU jumlahnya semakin banyak, terutama di kalangan pesantren dan di wilayah wilayah pedesaan di seluruh Tasikmalaya.

Salah satu tokoh NU generasi selanjutnya adalah KH. Mohamad Ilyas. Mohamad Ilyas atau yang lebih dikenal dengan Ilyas Ruhiyat lahir pada 31 Januari 1934. Ia putra pasangan Ajengan Ruhiat dan Siti Aisyah. Ilyas hanya nyantri di Cipasung. Sejak kecil, ia berpembawaan tenang dan sejuk, namun kharisma dan kecerdasannya diakui oleh para ulama di kalangan NU dan non-NU.

K.H. Ilyas memulai kariernya di organisasi NU sejak 1954, terpilih sebagai ketua NU Cabang Tasikmalaya. Saat itu ia merangkap ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Tahun 1985-1989, ia menjadi wakil rais Syuriah NU Jawa Barat. Tahun 1989, saat muktamar NU di Krapyak, Ilyas terpilih menjadi salah seorang rais Syuriah PBNU. Puncaknya,

tahun 1994, pada muktamar ke-29 NU yang berlangsung di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, ia terpilih menjadi *Rais Am* PBNU, mendampingi K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai ketua umum PBNU.

Pada saat muktamar NU di Krapyak, K.H. Ilyas menjadi salah satu anggota rais Syuriah PBNU. Kemudian, sejak Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Bandar Lampung tahun 1992, ia ditunjuk sebagai pelaksana rais am Syuriah NU, menggantikan Rais Am K.H. Ahmad Siddiq, yang wafat. Kemudian, ia kembali menjadi rais am untuk periode berikutnya, 1994-1999.

K.H. Muhammad Ilyas Ruhiat, atau kerap disebut “Ajengan Ilyas”, adalah sosok yang sangat santun, lembut, mengayomi, dan menebarkan aura kesejukan. Kepribadiannya mencerminkan tipikal ulama NU sejati: penuh toleransi, bersahaja, dan gandrung pada kedamaian.

Potret kesejukan Kiai Ilyas Ruhiat semakin mengemuka ketika NU diguncang prahara usai Muktamar Cipasung tahun 1994. Ketika itu perhelatan lima tahunan tersebut berakhir dengan pecahnya kepengurusan PBNU ke dalam dua kubu, pro Gus Dur dan pro Abu Hasan. Bahkan, kelompok kedua itu sempat mengadakan muktamar luar biasa di Asrama Haji Pondok Gede.

Lima tahun kemudian, dengan pendekatannya yang menyejukkan, perlahan warga NU kembali bersatu. Ketika merasa tugasnya untuk menyatukan jam‘iyah sudah selesai, bapak tiga anak ini kemudian mengundurkan diri pada Muktamar Lirboyo 1999. Ajengan Ilyas lebih memilih kembali mengajar di pesantrennya di lereng Gunung Galunggung. Ajengan Ilyas wafat pada Selasa 18 Desember 2007. Pengasuh Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, ini berpulang ke hadirat Allah SWT dalam usia 73 tahun.

Memang basis massa warga Nahdyin di Kota Tasikmalaya begitu mayoritas, dibandingkan dengan warga Islam lainnya di luar NU, misalnya warga Muhammadiyah dan Persis. Ini terlihat dari banyaknya pesantren-pesantren, atau sekolah yang berbasis NU di Kota Tasikmalaya, sementara pesantren-pesantren di luar NU bisa dihitung jari, atau hanya 2-3 pesantren di wilayah di Kota Tasikmalaya.

Namun permasalahannya untuk mengetahui berapa besar jumlah warga NU di Kota Tasikmalaya, secara legitimate organisasi NU belum mengetahui berapa jumlah pastinya. Karena NU tidak membuat kartu tanda anggota (KTA) untuk mendata jumlah warga NU secara jelas. Memiliki KTA sangat penting untuk bisa mengarahkan warga NU secara politis. Sehingga tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai warga Nahdyin, tapi tidak mencerminkan prinsip *aswaja*. Namun di sisi lain organisasi NU sesuai AD ART yang berbasiskan organisasi sosial kemasyarakatan, atau tidak terlibat aktif dalam politik. Membebaskan warga NU dalam politik, dalam hal ini pemilihan umum. Juga tidak ingin mengkotak-kotakan (fregmentasik) antara warga NU dengan warga lain yang bukan Nahdyin, agar saling bersama dalam masyarakat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kakan Rustandi⁷:

“Memang basis massa warga Nahdyin di Kota Tasikmalaya begitu mayoritas, dibandingkan dengan warga Islam lainnya di luar NU. Ini terlihat dari banyaknya pesantren-pesantren, atau sekolah yang berbasis NU di Kota Tasikmalaya, sementara pesantren-pesantren di luar NU

⁷ Diwawancarai di pada tanggal 8 Februari 2012 pukul 09.00

bisa dihitung jari, atau hanya 2-3 pesantren di wilayah di Kota Tasikmalaya. Namun mengetahui berapa besar jumlah warga NU di Kota Tasikmalaya, secara legitimate dan jelas NU belum mengetahui pasti berapa jumlah pastinya. Karena NU tidak membuat KTA. Memiliki KTA sangat penting untuk bisa mengarahkan warga NU secara sosial dan politis. Sehingga tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai warga Nahdyyin, tapi tidak mencerminkan prinsip aswaja”.

Namun di sisi lain, menurut Kakan, tidak adanya KTA khusus bagi warga nahdyyin yang dibuat oleh NU. Alasan yang paling kuat adalah kembali kepada AD ART NU sendiri, sebagai organisasi yang berbasiskan kepada sosial kemasyarakatan, atau tidak terlibat aktif dalam politik. NU sebagai organisasinya warga nahdyyin membebaskan warganya terkait masalah politik, dalam hal ini pemilihan umum. NU tidak ingin ingin mengkotak-kotakan (fregmentasi) antara warga NU dengan warga lain yang bukan Nahdyyin. Tujuan utamanya tanpa KTA sebagai tanda pengenalan khusus telah menciptakan warga nahdyyin agar saling bersama dalam masyarakat, dan tanpa membeda-bedakan status sosial, ekonomi dan politik.

Pergeseran Perilaku Memilih Pandangan Warga Nahdyyin di Tasikmalaya

Sebelumnya kita sudah membahas tentang latar belakang pendirian organisasi NU di Indonesia, namun untuk kembali mengingatkan secara komprehensif tentang perjalanan NU di Indonesia, dalam mengisi sejarah perpolitikan Indonesia hingga sekarang. Meski awal pendirian NU hanya bertekad berjuang di jalan Allah demi tegaknya agama Islam, dan berusaha mempersatukan umat Islam dalam kegiatan

penyebaran dan memperdalam ilmu agama Islam kepada masyarakat Indonesia. Walau demikian bukan berarti sikap NU mengabaikan persoalan politik, apalagi masalah bangsa dan negaranya. Namun pandangan NU terhadap perpolitikan Indonesia berubah, akan tetapi bukanlah pandangan untuk meraih kekuasaan politik, atau menguasai pemerintahan Indonesia. Konsistensi awal NU dan sikap umat nahdyyin pra kemerdekaan Indonesia paling utama adalah, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kolonialisme.

Perkembangan NU dengan corak pemikiran politik Islam yang memegang teguh salah satu dari mazhab *fiqh* yang empat (Hambali, Syafi’i, Maliki dan Hanafi), jauh sebelum NU terbentuk. Lahirnya NU tidak terlepas dari konteks historis, menjaga eksistensi komunitas (jam’ah) tradisional dengan tidak meninggalkan budaya-budaya yang sudah ada di masyarakat Indonesia. Hal ini tidak ubahnya mewadahi sumberdaya dan kultural yang ada di masyarakat Islam Indonesia. Sehingga perkembangan NU yang mendapat dukungan dari umat nahdyyin cukup pesat di Indonesia, terutama partisipasi dan dukungannya terhadap politik dalam pemilu.

Keterlibatan NU dalam sejarah perpolitikan Indonesia bisa dilacak pada studi yang dilakukan Deliar Noer (1987 dan 1996) dan A. Syafii Maarif (1987, 1988). Politik NU dari kedua peneliti tersebut dianggap sebagai kekuatan politik Islam tradisional yang seringkali mengambil posisi “*opportunis*” pada masa kekuasaan Soekarno, meski kesimpulan Noer dan Maarif tidak sepenuhnya benar, karena menurut M.Ali Haidar (1994) sikap politik

NU yang “zig zag” atau sulit diterka didasarkan atas pertimbangan kemaslatahan umat dan bangsa yang didasarkan pada *fikih* dan merujuk pada kaidah-kaidah *ushul fikih*.

Keterlibatan NU dalam politik praktis dimulai sejak keterlibatannya dalam Masyumi sebagai partai politik yang bisa mewadahi politik umat Islam pada era 1940-an. Tapi akhirnya keluar pada 1952 karena kekecewaannya terhadap kelompok Islam modernis (Muhammadiyah) di dalam tubuh Masyumi, sehingga NU berdiri sebagai parpol dan ikut pemilu pertama (1955). Dengan memiliki dukungan dari warga Nahdyyin pada pemilu 1955, suara NU mencapai 6.955.141 atau sekitar 18%, NU berhasil merebut 45 kursi di parlemen. Bahkan Soekarno menilai dengan kekuatan politik yang begitu besar menjadikan NU sebagai koalisi politiknya dalam memperkuat pemerintahannya. Kita bisa melihat hasil perolehan suara NU pertama kali pemilu Indonesia 1955 digelar.

Ketika pemerintahan Indonesia beralih kekuasaan ke tangan Soeharto, dan menggelar pemilu pada tahun 1971, NU sebagai salah satu kekuatan politik yang masih bercokol mempertahankan perolehan suara yang cukup signifikan. Pada pemilu 1971 suara NU mencapai 10.213.650 (18,68%) dengan mendapat 58 kursi di parlemen, di bawah bayang-bayang kekuatan politik Golkar yang mencapai 34.348.673 (62,82%) atau mendapat separuh kursi di parlemen (236 kursi). Dalam dua periode ini bisa dijadikan cerminan bahwa NU merupakan kekuatan politik yang memiliki potensi yang besar, meski Golkar secara terang-terangan telah menggusur kekuatan-kekuatan politik yang sebelumnya mewarnai perpolitikan

Indonesia, terutama kelompok-kelompok Islam.

Pasca 1971, Soeharto kembali melakukan langkah politis yakni menyederhanakan parpol, yang dimaksudkan untuk mempermudah kontrol dan menjaga stabilitas perpolitikan Indonesia. Sembilan parpol yang dianggap merupakan politik non Golkar dipaksa melebur ke dalam salah satu wadah politik prakarsa pemerintah. Misalnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan gabungan dari partai yang berbasis massa Islam. NU terpaksa untuk bergabung dalam organisasi tersebut, meski pada realitasnya warga NU tidak terkesan karena harus bergabung dengan kelompok Islam lainnya yang secara teologis-ideologis berbeda pandangan. Bahkan terkesan membuka ruang konflik yang tak berkesudahan di dalam satu parpol berbasis Islam tersebut.

Akan tetapi warga nahdyyin terus memperlihatkan konsistensinya agar kelompok Islam memiliki kekuatan politik dimata pemerintah. Warga Nahdyyin merupakan penyumbang terbesar bagi PPP dalam pemilu. Meski pada realitasnya warga nahdyyin secara teologis-ideologis dan psikologis tidak nyaman ketika harus memilih PPP, namun karena didasarkan sebagai salah satu partai yang menjadi wadah politik warga muslim khususnya warga nahdyyin, meski tidak secara substansial merupakan wadah bagi warga NU sendiri. Tujuan dan semangatnya adalah memperjuangkan umat Islam, demokrasi, dan demi tegaknya ajaran Islam paham *ahlusunnah wal jamaah* di Indonesia.

Kita bisa menelaah pada tabel di bawah ini mengenai perolehan suara NU dan PPP yang dimulai pada pemilu

pertama 1955 hingga tahun 1997. Sebagai perbandingan yang bisa dijadikan patokan penting bagi sejarah politik Islam di Indonesia.

Pasca tumbangya kekuasaan Soeharto pada 1998, NU mencoba peruntungan kembali sebagai salah satu kekuatan politik lama di Indonesia. Euforia reformasi mengembalikan NU ke kancah perpolitikan Indonesia, inipun tidak terlepas adanya desakan arus bawah warga nahdiyyin agar NU menjadi parpol. Namun desakan tersebut tidak menggoyahkan PBNU untuk memasukan NU menjadi parpol. Karena keterikatannya kepada keputusan NU, kembali ke Khittah 1926 sebagai organisasi sosial keagamaan yang digelar pada Mukhtar NU 1984 di Situbondo, 1989 di Krapyak-Yogyakarta, serta 1994 di Cipasung-Tasikmalaya.

Namun desakan warga nahdiyyin, telah meluluhkan PBNU untuk memfasilitasi dan merespon aspirasi warga nahdiyyin dengan berdirinya parpol dengan nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dideklarasikan pada 23 Juli 1998 di kediaman Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU, di Ciganjur Jakarta Selatan. Pimpinan PKB dipercayakan kepada K.H. Ma'ruf Amin sebagai Dewan Syuro DPP PKB, dan H.Matori Abdul Djalil sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB (dalam Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, 1999).

Berdirinya PKB sebagai wadah politik warga NU yang secara teologis-ideologis, struktural dan formal memfasilitasi PBNU, telah mengundang reaksi dari beberapa politisi NU dan ulama yang tidak terakomodasi dalam PKB. Secara ideologis juga ada beberapa ulama dan politisi NU berseberangan dengan

pandangan politik Gus Dur. Misalnya K.H Syukron Ma'mum mendirikan Partai Nahdlatul Ummah (PNU), K.H. Yusuf Hasyim (Partai Kebangkitan Umat/PKU), Abu Hasan (Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia/P.Suni). Namun realitasnya PKB dianggap sebagai partai istimewa dalam memfasilitasi aspirasi bagi warga Nahdiyyin. Tapi juga dihadapkan dengan kompetisi parpol lainnya di luar basis warga NU, juga warga NU yang masih aktif dalam partai seperti PPP, Golkar, bahkan di PDIP.

Pemilu pertama masa reformasi (1999) yang diikuti 48 partai, PKB akhirnya mendapat suara ketiga setelah PDIP dan Golkar. Dwight Y King melihat hasil pemilu 1999 menggambarkan pemilu 1955 dan 1971, dilihat dari basis massa dukungan, pemilih PDIP mewakili kelompok nasionalis-sekuler, PKB basis massa Islam tradisional, sementara PAN, Partai Keadilan, dan Partai Bulan Bintang mewakili massa Islam Modernis (Muhammadiyah, dan eks-Masyumi).

Jika membandingkan PKB dengan parpol yang berbasis massa NU, PKB mendapat suara terbanyak sebesar 12,6% suara, sementara PNU hanya 0,64%, PKU (0,28%), dan P.SUNI (0,17%). Perilaku pemilih atau warga Nahdiyyin lebih mempercayakan pilihan politiknya kepada PKB sebagai partai yang didirikan PBNU. Perolehan suara PKB ini tetap saja tidak mengembalikan suara NU yang cukup besar pada tahun 1955 (18,41%) atau 1971 (18,86%). Ini bisa dikatakan pada pemilu 1999, suara NU terpecah dengan munculnya parpol yang juga berbasis dan mengatasnamakan NU. Jika saja suara warga nahdiyyin tidak terpecah dalam berbagai parpol dengan basis yang

hampir sama, atau masuk ke dalam PKB secara total. Tidak menutup kemungkinan PKB telah menjadi partai politik berbasis Islam pertama, yang menguasai politik dan pemerintahan Indonesia. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya perubahan terhadap sistem politik Indonesia pasca reformasi ini.

Namun konstalasi politik PKB pasca reformasi bukan membawa dampak positif bagi perpolitikan PKB, ini terbukti pada perolehan suara PKB pada pemilu 2004, PKB semakin mengalami penurunan jumlah suara sebesar (10,57%) jika dibandingkan pada pemilu 1999. Meski partai politik Islam berbasis massa NU hanya disaingi oleh PPNUI yang hanya memperoleh (0,79%). Meski masih memiliki dukungan suara, namun secara substansif ada penurunan yang signifikan bagi perilaku pemilih warga NU terhadap parpol yang berbasis Islam tradisional pada era reformasi ini.

Apalagi menjelang pemilu 2009 lalu, PKB akhirnya mengalami perpecahan internal, secara tidak langsung PKB mengalami pengembosan suara politik, di satu sisi mendukung Gus Dur dan sisi lain mendukung keponakan Gus Dur sendiri (Muhaimin Iskandar). Sehingga perilaku pemilih warga nahdhiyin mengalami kebingungan arah politik, yang secara tidak langsung dimanfaatkan kompetitor lain seperti PKNU atau PPP, atau parpol berbasis non Islam. Pemilu 2009 suara PKB hanya mendapat suara sebanyak (4,94%), sementara PKNU (1,47%), sementara sisanya menyebar ke parpol lain. Jelas secara langsung kekisruhan internal di tubuh PKB telah merugikan partai yang mewadahi warga nahdhiyin tersebut.

Namun apapun itu, era reformasi menuju demokrasi substansial, telah terjadi perubahan signifikan terhadap perilaku politik bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga nahdhiyin. Jika sebelumnya dengan karakteristik Islam Tradisional, yang selalu *takdjim* terhadap petuah kiyai NU atau budaya politik masyarakat nahdhiyin sendiri yang sudah mengakar kuat sejak lama. Namun era reformasi ini adanya pergeseran perilaku pemilih warga nahdhiyin ke arah rasional dan cerdas, untuk memilih parpol yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia ke depan. Masyarakat tidak lagi melihat pada ideologis parpol, namun melihat kepada platform dan program politik yang realistis.

Melihat kecenderungan dinamika politik NU di Indonesia, dan perilaku pemilih dari warga NU dalam memberikan suara pada pemilu di era reformasi ini, jelas bisa dikatakan memiliki dinamika politik tersendiri pada warga NU yang semakin terbuka dan rasional. Dinamika perilaku pemilih warga NU ini coba dilakukan penulis untuk meneliti perilaku pemilih NU di Kota Tasikmalaya yang merupakan sebagai basis utama massa NU. Pondok Pesantren terbesar Cipasung merupakan basis utama warga Tasikmalaya secara umum NU di Jawa Barat. Bahkan bisa dijadikan tolok ukur kekuatan politik NU di kancah perpolitikan Indonesia.

Menurut Irsyadul Ubad sebagai staf pengajar di STAINU, permasalahan politik NU yang mengalami pasang surut, memang tidak terlepas dari sejarah politik Indonesia itu sendiri. Awal pendirian NU sebagai organisasi sosial tidak bisa dilepaskan dari permasalahan politik Indonesia, sehingga NU terlibat aktif dalam

perpolitikan Indonesia. Tapi kekisruhan politik yang akhirnya mengecewakan warga NU, membuat NU kembali ke Khittah 1926 sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan pendidikan.

Namun menurut Irsyadul Ubad yang juga pengurus NU, pasca reformasi hasrat NU untuk terjun langsung ke kancah politik masih sangat besar, beberapa partai berbasis NU bermunculan di pada pemilu 1999. Secara formal NU atau petinggi NU mendirikan partai politik ada yang berbasis NU, sehingga sangat wajar banyak umat NU terlibat aktif berpolitik, namun akar organisasi NU sendiri tidak berpolitik. Namun kembali lagi kepada Khittah 1926 dan AD ART NU, bahwa organisasi ini tidak mengarahkan atau terlibat aktif dalam politik, tapi secara personal diperbolehkan atau bebas memilih partai manapun. Apalagi berkaitan dengan Pemilukada Kota Tasikmalaya yang akan digelar dalam beberapa bulan ke depan. NU membebaskan warganya untuk memilih pemimpin yang tepat bagi Kota Tasikmalaya.

Sementara itu, K.H Supyan Sauri sebagai pendidik sekaligus pendiri Lembaga Pendidikan Islam Al Qomariyyah Jarnauziyyah, di Cipawitra Cikunir Hilir Mangkubumi Kota Tasikmalaya mengatakan, ketika sudah adanya pergeseran perilaku pemilih bahkan adanya penurunan suara dari warga nahdiyyin terhadap parpol yang dianggap partai yang mewedahi warga NU. Seharusnya menjadi instropeksi diri bagi pemimpin (kyai) begitupula dengan praktisi politik. Kenapa sebagian besar warga NU sudah tidak tertarik lagi mendukung PKB, yang notabenenya sebagai partai politik yang menampung aspirasi warga NU. Hal ini

yang disebut dengan krisis kepercayaan dari warga NU terhadap pemimpinnya dan parpol tersebut. Padahal sangat penting dan wajib, ketika warga NU mendukung parpol seperti PKB, sebagai mesin politik penyalur aspirasi warga NU. Tapi dengan adanya perpecahan di PKB sendiri yang sudah terjadi, semakin melemahkan keyakinan warga NU terhadap partai berbasis NU, warga NU sudah antipasti terhadap tidak adanya pemimpin yang amanah. Sehingga tidak bisa dipungkiri suara PKB dan dukungan warga NU terhadap PKB semakin melorot pada pemilu maupun pemilukada.

“Jika para pemimpin dan kyai tidak segera intropeksi diri kenapa penurunan suara parpol berbasis NU, tidak dipungkiri lagi parpol yang berbasis atau yang mewedahi warga NU, dipastikan dalam pemilu-pemilu berikutnya parpol berbasis NU akan berakhir di kancah perpolitikan Indonesia”⁸.

K.H Supyan Sauri merupakan sebagai salah satu pendiri ponpes di Kota Tasikmalaya, beliau sebelumnya adalah pengurus PPP dari tahun 1982-1987, pasca 1987 beliau mengundurkan diri dari PPP, karena banyaknya permainan politik dan tindakan-tindakan kotor untuk menghalalkan segala cara demi kepentingan politik, menyebabkan beliau tidak ingin terlibat lagi aktif berpolitik secara langsung, beliau mengaku lebih memfokuskan diri kepada masalah pendidikan agama Islam di Tasikmalaya.

Sementara itu Kakan Rustandi mengaku sudah tidak antusiasme lagi dengan permasalahan politik, apakah sebagai warga nahdiyyin akan kami memilih partai berbasis

⁸ Wawancara pada tanggal 14 Februari 2012 pukul 09.00)

NU, tergantung apakah parpol memberikan pemahaman, sosialisasi dan program partai yang jelas bagi kepentingan umat. Namun sejauh ini dia tidak tertarik lagi dengan permasalahan politik.

“Apakah kami sebagai warga nahdyyin akan memilih partai berbasis NU atau tidak, yang jelas kami sudah lagi tertarik lagi dengan permasalahan politik. NU sendiri sebagai organisasi sudah menguatkan tekad tidak akan mengarahkan warga NU untuk memilih partai berbasis NU. Warga NU sendiri sekarang sudah semakin rasional dan berfikir logis untuk mencari pemimpin atau wakil rakyat yang mampu mensejahterakan rakyat”⁹.

Bahkan jika dikatakan bahwa adanya pergeseran perilaku politik warga nahdyyin, memang tidak terlepas dari masalah internal di tubuh parpol yang menjadi basis atau wadah politik warga nahdyyin. Kemudian adanya keinginan pemimpin atau kyai untuk menghormati NU untuk kembali sebagai organisasi sosial dan keagamaan, sesuai Khittah 1926. Ditambah lagi adanya perubahan paradigma warga nahdyyin untuk terlepas dari dogma Islam Tradisional. Warga nahdyyin lebih terbuka cakrawalanya dan lebih rasional ketika berkaitan dengan masalah politik.

Kakan menjelaskan, jika masalah politik berbasis NU berkaitan dengan permasalahan bahwa warga nahdyyin yang memegang prinsip atau menganut Islam tradisional, sejauh ini anggapan tersebut mungkin hanya seputar di lingkungan pesantren atau kalangan santri. Sementara warga nahdyyin di luar pesantren sudah sangat moderat, mengakulturasikan dengan budaya lain yang lebih modernis. Namun dikalangan pesantren pun anggapan

tradisional hanya berkaitan dengan seputar keagamaan, namun di sisi lain sudah sangat modern, hal ini terkait semakin pesatnya teknologi dan informasi yang bisa diakses oleh kalangan santri atau pelajar dalam menuntut ilmu. Jika berkaitan dengan cara berpakaian, bahwa kalangan nahdyyin selalu menggunakan peci (kopiah), sarung dan sorban. Seputar pakaian ini dilihat dari kalangan pesantren (santri) yang mengikuti aturan yang ada, atau dilihat dari pemuka atau pemimpin NU. Tapi berkembangnya budaya yang ada, warga NU di luar pesantren tidak selalu berpakaian seperti itu, sebagian besar mengikuti perkembangan budaya yang ada, yang penting sopan dan beretika.

Kemudian K.H Supyan Sauri juga menegaskan sikap masyarakat NU yang cenderung “menurut” (*takdzim*) dengan apa yang dikatakan pemimpin ulama (kyai) atau ustadznya. Merupakan sesuatu yang penting dan wajib bagi masyarakat NU khususnya, agar mendapat keberkahan dan pahala ketika bersikap *takdzim* kepada ulama. Namun hal ini sikap *takdzim* ini hanya dilakukan pada masalah sosial keagamaan, tapi tidak pada permasalahan politik.

Akan tetapi, beliau tidak bisa memungkiri bahwa sikap *Takdzim* kepada pemuka agama, pemimpin, atau kyai ikut terbawa kepada masalah perpolitikan. Misalnya ketika salah satu pemimpin NU ikut terlibat dalam politik, bukan rahasia lagi masyarakat NU, khususnya santri turut mendukung pemimpin tersebut. Meski pemimpin NU tidak mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di parlemen, atau sebagai pemimpin (Bupati/Walikota). Padahal NU sebagai organisasi membebaskan masyarakat atau warga

⁹ Wawancara pada tanggal 8 Februari 2012

NU untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat manapun, tidak perlu harus bersikap *takdzim* kepada pemimpin (kyai) ketika berkaitan dengan masalah politik. Ini juga bisa dipengaruhi dengan pengaruh figur atau wibawa dari ulama tersebut, yang menyebabkan warga NU mendukung salah satu pemimpin (kyai) dari kalangan NU.

“Misalnya ketika salah satu kyai terlibat dengan partai yang dibenci atau tidak disukai oleh warga NU, misalnya Golkar yang ketika itu sebagai partai penguasa Orde Baru. Yang menekan rakyat Indonesia, terutama warga NU. Namun karena ingin bersikap *takdzim* tersebut dari warga NU kepada kyainya. Maka secara tidak langsung hal ini tidak bisa diterima secara agama, karena kepentingan politik merupakan masalah pribadi, dan sudah banyak mudorotnya dibanding manfaatnya”.

Berpolitik saat ini hanya diukur oleh kepentingan uang dan kekuasaan, hal ini yang menyebabkan pengurus-pengurus NU terutama kalangan Kyai silau ketika disodorkan oleh kepentingan duniawi tersebut. Pemimpin NU banyak yang tidak istiqomah dan tidak memberi amanah kepada warganya, sehingga hal ini pun yang menyebabkan pergeseran perilaku di kalangan NU sendiri yang sudah semakin rasional”.¹⁰

Namun Kakan Rustandi memberikan beberapa analisis dan kesimpulan mengenai pergeseran warga nahdiyyin terhadap politik nasional maupun daerah, bahwa adanya penurunan dukungan terhadap partai politik berbasis NU, hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor (1) Semakin rasionalnya warga NU dalam partisipasi politik untuk memilih; (2) Pengaruh teknologi, informasi, dan budaya politik yang semakin berpengaruh di masyarakat; (3) Sebagian besar warga NU memang

¹⁰Wawancara pada tanggal 14 Februari 2012, pukul 09.00

cenderung pragmatis atau moderat dalam masalah perpolitikan di Indonesia; (4) Tidak menafikan, bahwa pecahnya kongsi Muhaemin dan Gus Dur ikut berpengaruh terhadap partisipasi politik warga NU secara umum, sehingga warga NU bingung menentukan sikap untuk memilih organisasi politik yang bisa mewakili warga NU sendiri. Sehingga mereka bebas memilih siapa saja yang penting mampu memberikan yang terbaik; (5) Secara jelas dengan pecahnya kongsi tersebut partai nasionalis atau partai Islam di luar NU diuntungkan dengan pergeseran politik tersebut; (6) Pergeseran perilaku pemilih NU dengan pecahnya kongsi PKB, menjadikan perolehan suara PKB semakin melorot, ini yang menyebabkan warga NU tidak tertarik lagi dengan politik, meskipun tertarik tapi belum tentu ke PKB.

Faktor yang terakhir yang peneliti anggap sebagai faktor yang sangat mempengaruhi preferensi politik kalangan Islam Tradisional di Tasikmalaya menjadi sedikit berubah, Garis demarkasi yang tegas antara NU dan PKB, relasi antar keduanya semakin tampak kabur, ketika dihadapkan pada realitas perpolitikan yang ditunjukkan oleh organisasi NU dan warganya secara umum. Keterlibatan aktif para tokoh dan kader NU dalam mendirikan dan mengelola partai-partai lain non-PKB pada taraf tertentu, dapat diartikan bahwa masyarakat mulai merubah kembali *political sphere*, dan tampak kian berorientasi kepada suatu upaya untuk kembali aktif dalam politik.

Faktor-faktor di atas tentu saja tidak bisa menggambarkan secara utuh kecenderungan pergeseran perilaku memilih semua warga Nahdiyyin Tasikmalaya. Terdapat perbedaan secara tegas antara

Warga Nahdiiyin di wilayah perkotaan dengan mereka yang berdomisili di pinggiran kota. Bagi masyarakat kota, dimana perkembangan teknologi, informasi, dan budaya politik yang semakin berpengaruh di masyarakat, pergeseran perilaku pemilih terlihat jelas, kultur modern masyarakat kota secara keseluruhan memberikan andil bagi terbukanya pemikiran masyarakat terhadap preferensi politik mereka, di satu sisi mereka terlihat pragmatis dalam memilih terutama dikalangan masyarakat urban, disisi lain terlihat sangat rasional karena tingkat pendidikan politik yang tinggi.

Sementara di kalangan nahdiiyin pinggiran kota dimana kultur pedesaan masih melekat erat, perubahan perilaku memilih jamiyah NU cenderung bersifat lambat, kultur politik nahdiiyin masih mendapatkan tempat pada sebagian masyarakat desa terutama yang dekat dengan kalangan pesantren. Walaupun tidak seluruhnya, budaya politik kaula masih melekat dalam kultur politik masyarakat pinggiran kota. Begitu pula dengan preferensi politik mereka masih bergantung pada pimpinan kelompok yang dalam hal ini diperankan oleh ustadz ataupun kiyai.

Daftar Pustaka

Afandi, Arief (ed), 1997, *Islam Demokrasi Atas Bawah : Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amin Rais*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Feith, Herbeth dan Lance Castle. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. LP3ES : Jakarta.

Simpulan

Dari penelitian diatas dapat kita simpulkan bahwa terdapat pergeseran perilaku memilih di kalangan Islam tradisional di Tasikmalaya, hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor, antara lain: *Pertama*, semakin rasionalnya warga NU dalam partisipasi politik untuk memilih; *Kedua*, pengaruh teknologi, informasi, dan budaya politik yang semakin berpengaruh di masyarakat; *Ketiga*, Sebagian besar warga NU memang cenderung pragmatis atau moderat dalam masalah perpolitikan di Indonesia; *Keempat*, Tidak menafikan, bahwa pecahnya kongsi Muhaimin dan Gus Dur ikut berpengaruh terhadap partisipasi politik warga NU secara umum, sehingga warga NU bingung menentukan sikap untuk memilih organisasi politik yang bisa mewakili warga NU sendiri. Sehingga mereka bebas memilih siapa saja yang penting mampu memberikan yang terbaik, dan yang *Kelima*, Pergeseran perilaku pemilih NU dengan pecahnya kongsi PKB, menjadikan perolehan suara PKB semakin melorot, ini yang menyebabkan warga NU tidak tertarik lagi dengan politik, meskipun tertarik tapi belum tentu ke PKB.

Hakim, Tatang Farhanul, 2004. *Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat*, CV. Gadjah Poeloeng: Tasikmalaya.

Muchtar, Nadjid, dkk., 2007, *Islam Ahlussunah wal Jamaah di Indonesia : Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika Nahdlatul Ulama*, Pustaka Ma'arif NU, Jakarta.

Marsh, David and Stoker, 2002, *Theory and Methode in Political Science : Second Edition*, Palgrave, Macmillan.

Moleong, Lexi, 1989, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Erlangga, Jakarta.

Muhadjir, Nung, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi III, Penerbit Rake Sarakan, Jakarta.

Mulyana, Deddy 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Sutopo, H., 1988, *Pengantar Penelitian Kualitatif: dasar-dasar teoritis dan praktis*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Fathoni, Khoirul dan Muh. Zen, 1992, *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Media Widya Mandala, Yogyakarta.

Sumber lain

Haris, Abdul, dkk., 2002, *Pergeseran Perilaku Politik Kultural Nahdlatul Ulama (NU) di Era Multi Partai Pasca Orde Baru (Studi Kasus NU Jember, Jawa Timur)*, Penelitian, Lit Bang Depag. Jakarta.

Agung, Subhan, 2010, *Macetnya Mesin Parpol: Studi Pergeseran Perilaku Memilih Konstituen Golkar pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2004*, makalah, tidak dipublikasikan.

Muhamad, Robi, *Swing Voters dan Jejaring Sosial*, di <http://www.politikana.com>, 21 Maret 2009.

Roth, Dieter, 2003, *Studi Pemilu Empiris : Sumber, Teori-teori, dan Metode*, (terj.), Friedrich Naumann-Stiftung-Fur die Freiheit, Jakarta. Hal.23-53

Syamsuddin Haris dan Tri Rainny Syafarani, 2005, *Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia dan Masalah Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*, LIPI, Jakarta. hal. 98-99.